



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Implikasi Hukum Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Oleh DPMPTSP Provinsi Papua

Terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu (Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Oleh PT Indo

Asiana Lestari Di Kabupaten Boven Digoel)

Muhammad Faturrahman Hadid, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

# IMPLIKASI HUKUM PENERBITAN SURAT IZIN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT OLEH DPMPTSP PROVINSI PAPUA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU AWYU

(STUDI KASUS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT OLEH PT INDO ASIANA LESTARI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL)

**Muhammad Faturrahman Hadid\* dan Rimawati\*\***

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pengelolaan kawasan hutan adat yang diajukan oleh PT Indo Asiana Lestari kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Boven Digoel, dan untuk mengetahui dampak penerbitan surat izin pengelolaan kawasan hutan yang dikeluarkan DPMPTSP Provinsi Papua terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sifat penelitian berupa deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Sumber data primer dari subjek penelitian yang berada di Kabupaten Boven Digoel. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan perizinan kawasan hutan adat di DPMPTSP harus memiliki izin lokasi, izin lingkungan, izin pelepasan kawasan hutan, dan hak guna usaha dimana pengurusan ini harus mengikuti mekanisme pelepasan hak dari tanah ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat suku Awyu; dan 2) Dampak yang diberikan dari izin pengelolaan kawasan hutan yaitu dampak positif dan negatif, dampak positif Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu mendapat lapangan pekerjaan dan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, dan air bersih. Dampak negatifnya Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu terancam kehilangan hutan adat, tempat bersejarah, sekolah adat, serta akan merusak lingkungan dan budaya lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu.

**Kata Kunci:** Masyarakat Hukum Adat, Perizinan, Pengelolaan Kawasan Hutan Adat, dan Suku Awyu.

---

\* Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (muhammadfaturrahmanhadid2797@mail.ugm.ac.id).

\*\* Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (rimawati@ugm.ac.id).



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Implikasi Hukum Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Oleh DPMPTSP Provinsi Papua Terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu (Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Kabupaten Boven Digoel)  
Muhammad Faturrahman Hadid, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.  
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**LEGAL IMPLICATIONS OF THE ISSUANCE OF A PERMIT FOR THE  
MANAGEMENT OF CUSTOMARY FOREST AREAS BY THE DPMPTSP OF  
PAPUA PROVINCE ON THE AWYU TRIBE'S CUSTOMARY LAW COMMUNITY  
(CASE STUDY OF CUSTOMARY FOREST MANAGEMENT BY PT INDO ASIANA  
LESTARI IN BOVEN DIGOEL DISTRICT)**

**Muhammad Faturrahman Hadid\* dan Rimawati\*\***

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the implementation of the customary forest area management permit submitted by PT Indo Asiana Lestari to the Investment and One-Stop Integrated Service Office in Boven Digoel Regency, and to find out the impact of the issuance of a forest area management permit issued by the DPMPTSP of Papua Province on the existence of the Awyu Tribe Community.*

*This legal research uses empirical juridical research, the nature of the research is descriptive. This research uses primary data and secondary data. Primary data is collected through field studies, while secondary data is collected through literature studies. Primary data sources from research subjects are in Boven Digoel Regency. The data was then analysed qualitatively.*

*The research results: 1) The implementation of customary forest area licensing in DPMPTSP must have a location permit, environmental permit, forest area release permit, and business use right where this arrangement must follow the mechanism of releasing rights from customary land owned by the Awyu Tribe Community; and 2) The impact of the forest area management permit is positive and negative, the positive impact of the Awyu Indigenous People gets jobs and facilities for education, health, electricity, and clean water. The negative impact is that the Awyu Customary Law Community is threatened with losing customary forests, historical places, traditional schools, and will damage the environment and local culture that has existed since ancient times.*

**Keywords:** *Customary Law Community, Licensing, Customary Forest Area Management, and Tribe of Awyu Community.*

---

\* Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (muhammadfaturrahmanhadid2797@mail.ugm.ac.id).

\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (rimawati@ugm.ac.id).